



RENCANA KERJA

RENJA

TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2020

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini terasa berbeda dengan Dokumen Renja sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan format penyusunan APBD dari sebelumnya berdasar pada Permendagri 33 tahun 2019 kemudian mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang dalam prakteknya menggunakan format SIPD yang diatur dalam Permendagri 70 tahun 2019.

Tentunya perubahan system ini membutuhkan proses peralihan yang tidak serta merta memunculkan nomenklatur program kegiatan tanpa mengikutsertakan nomenklatur yang lama mengingat acuan yang menjadi dasar penyusunan Renja ini masih menggunakan dokumen perencanaan dalam system yang lama yaitu Renstra dan RPJMD.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dokumen Renja ini memuat target indicator kinerja utama yang akan dicapai, program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapainya, dan hal-hal terkait lainnya. Namun yang membedakan dari Renja sebelumnya adalah bahwa di dalam penyusunan Renja ini terdapat proses pemetaan. Pemetaan yang dimaksud adalah penyesuaian program kegiatan lama ke dalam nomenklatur yang terdapat dalam Permen 90 sehingga tidak mengabaikan proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya yang tertuang dalam dokumen Renstra dan RPJMD.

Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan capaian Pertumbuhan PDRB sector Perindustrian sebesar 7 % sementara untuk pertumbuhan sector perdagangan kami menargetkan capain sebesar 5 %.

Kami menyadari bahwa capaian target tersebut membutuhkan dukungan pemangkut kepentingan lainnya terutama masyarakat dari sector swasta. Untuk itu sesuai tugas dan fungsi kami selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya demi iklim pembangunan industry dan perdagangan yang kondusif.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, semoga apa yang telah kami rencanakan dan susun ini dapat berjalan secara optimal.

Pontianak, Juli 2020
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660408 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
I.3.1 Maksud	5
I.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Dokumen Renja	6
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
1. MISI.....	8
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DAerah	11
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	19
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	19
III.3 Program dan Kegiatan.....	22
Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
Bab 5 PENUTUP	26

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD di mana sistematisa penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 serta Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Prov. Kalbar 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan mengkomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam proses penyusunan Renja ini telah disesuaikan dengan **perubahan nomenklatur Dinas Perindag Prov. Kalbar yang telah ditetapkan pada Tahun 2018**, hasil rapat-rapat kerja atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, serta Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se-Kalimantan Barat tahun 2019 (Forum OPD Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar tahun 2020) yang melibatkan instansi dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar OPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja 2020 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

- Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomer 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 72);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 MAKSUD

- a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2021.
- b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

I.3.2 TUJUAN

- a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2023, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.
- b. Menyelaraskan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan program nasional di bidang perindustrian dan perdagangan, program kabupaten/kota, isu – isu strategis, usulan – usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perindustrian dan perdagangan.

I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

Dokumen Renja 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.4. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2019-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah "Kalimantan Barat Bersatu dan Maju". Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai.

1. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan

dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri Pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Melalui pelaksanaan misi tersebut, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	1.1	Meningkatnya dan Berkembangnya Perdagangan Luar Negeri
		1.2	Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	2	Terbangunnya dan terberdayanya industri Kalbar

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama setiap sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Target Kinerja 2020	Bidang Penanggung Jawab
1	2	3		4	6	7
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	5.2	DAGRI, DAGLU, DAN UPSMB
2	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB	2.1	Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6.5	KPPII, PSDI, PPI, DAN UPT IPOK

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan telah berjalan dengan baik terlihat dari capaian Sasaran Strategis yang memuat IKU Disperindag Prov. Kalbar pada tahun 2019 serta realisasi keuangan baik yang bersumber dari dana APBD ataupun Dekonsentrasi. Walaupun begitu, peningkatan pelayanan merupakan suatu keharusan sehingga dapat memberikan dorongan yang lebih baik dalam rangka pencapaian target kinerja yang tersurat pada Renstra Disperindag 2019 – 2023 dan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan agar semakin baik kedepannya, perlu ditingkatkan koordinasi baik pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan se-Kalimantan Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar menyediakan beberapa pelayanan bagi masyarakat seperti adanya pelayanan penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan fasilitasi ekspor, pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi peralatan yang telah diakreditasi oleh KAN, pelayanan pelatihan bagi IKM untuk peningkatan SDM, serta pelayanan klinik kemasan.

Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan oleh Disperindag Prov. Kalbar meningkat setiap tahunnya dan selalu mencapai target. Pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi peralatan juga meningkat setiap tahunnya dan selalu mencapai target. Hal ini menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan semakin baik dan kedepannya pelayanan ini akan ditingkatkan lebih lanjut.

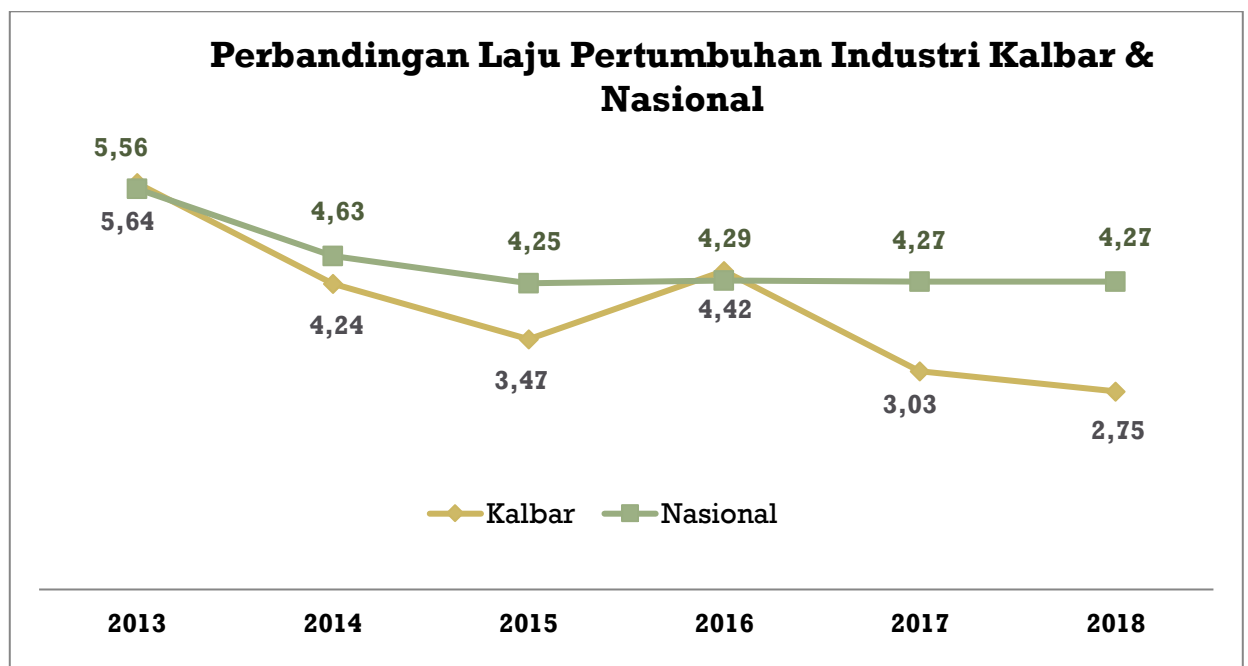
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, terdapat permasalahan dan kendala yang perlu segera untuk diselesaikan. Namun hal tersebut memerlukan peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan sektor Industri dan Perdagangan Kalbar yaitu:

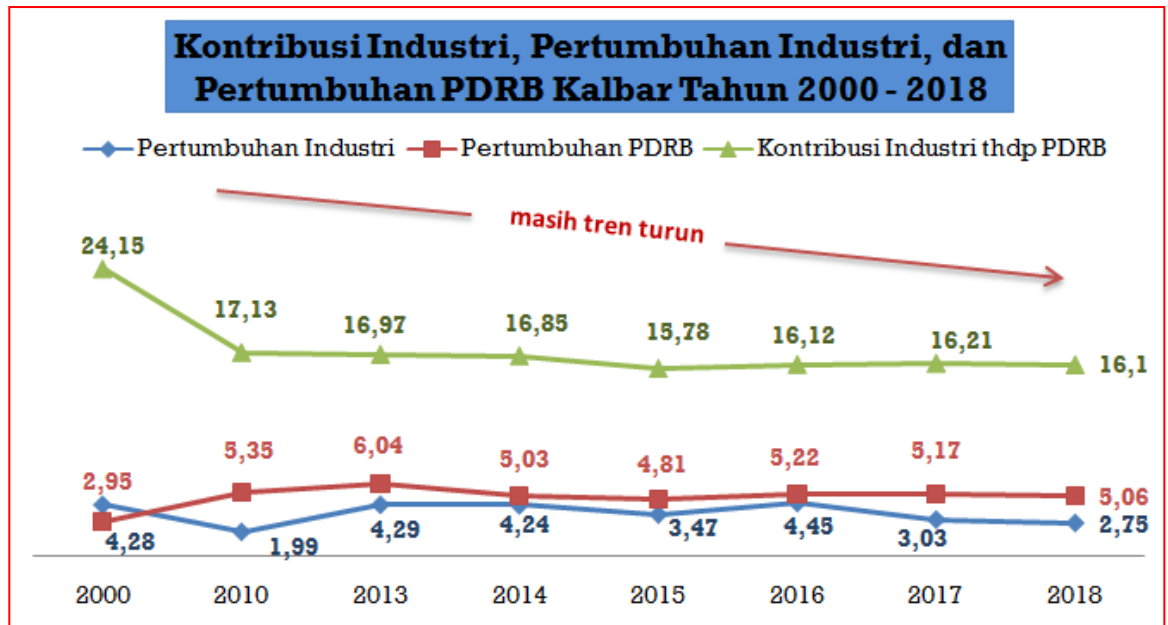
- **Sektor Perindustrian**

Sektor industri sampai dengan tahun 2020 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri kalbar antara 3-4% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional, bahkan pada tahun 2018 capaian laju pertumbuhan sektor industri tidak mencapai angka 3%



Sumber : BPS Kalbar, 2019. (Data Diolah)

Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana kontribusi sektor industri yang berada pada kisaran 16-17%. Angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor industri pada tahun 2000 yang mencapai 24,15%.

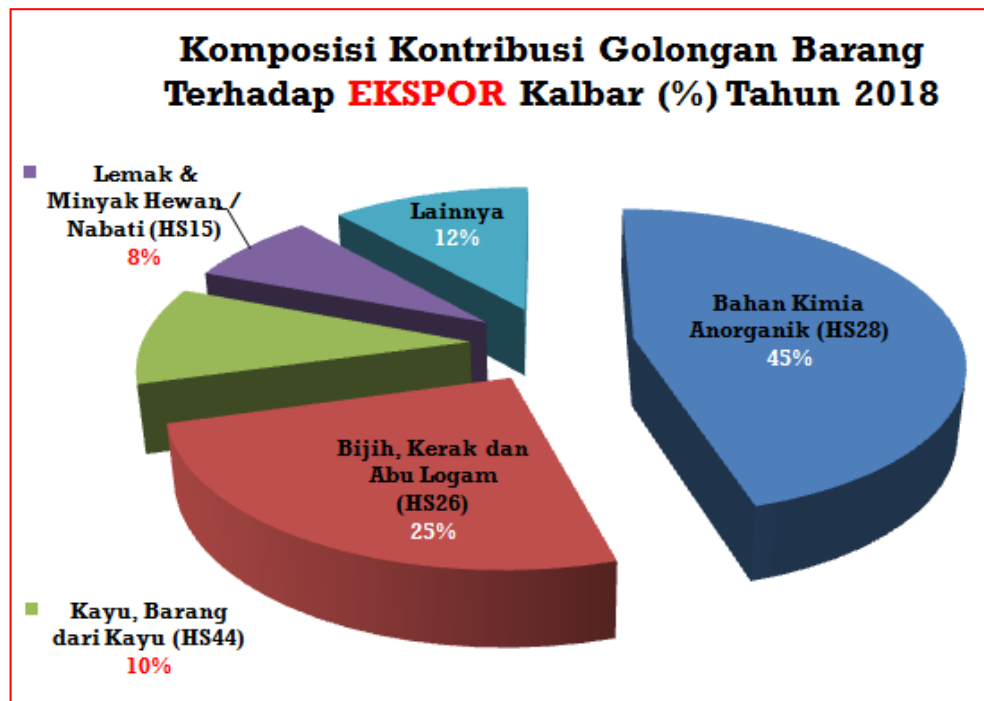


Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditi utama Kalbar baik Karet, Kelapa Sawit, maupun Bauksit dimana saat ini masih terpaku pada produk tertentu (setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut yang dibarengi dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan inovasi, serta efisiensi proses produksi.
2. Minimnya sarana dan sarana dasar (kelistrikan, air bersih, jalan, dsb) dalam rangka mendukung investasi sektor industri Kalbar. Pentingnya realisasi pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalbar.
3. Minimnya kompetensi SDM Industri baik Industri besar maupun IKM yang dapat mengeksploitasi SDA yang dimiliki oleh daerah. Peningkatan SDM Industri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi SDM Industri perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kedepannya.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini baik dari sisi ketersediaan akses internet di daerah maupun

pengetahuan pelaku usaha IKM yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengatasinya. Minimnya koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) diharapkan dapat segera diperbaiki agar dapat meningkatkan peran IKM dalam pengembangan industri Kalbar



Sumber : BPS Kalbar 2019.

Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi sektor industri Kalbar. Namun pada sisi lainnya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan kebijakan lainnya (regulasi ekspor, bahan baku, pangsa pasar, hilirisasi komoditi, dsb). Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang wajib diselesaikan dalam rangka pengembangan sektor industri Kalbar. Secara umum, tantangan dan peluang pada sektor industri dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Tantangan :**

- a. Pemanfaatan SDA Kalbar secara maksimal yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk (hilirisasi).
- b. Pentingnya Penggunaan teknologi yang tepat sasaran khususnya bagi IKM Kalbar sehingga diharapkan dapat menekan harga produksi produk, peningkatan kualitas produk, serta memberikan efektifitas produksi.

- c. Peningkatan kapasitas SDM terutama SDM IKM agar dapat memanfaatkan peluang usaha pada era pengunggunan teknologi informasi yang berkembang saat ini sehingga dapat berdaya saing dengan pelaku lainnya. Selain itu juga diperlukannya penyediaan akses internet serta pendampingan bagi IKM agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yang selalu berkembang pesat setiap saat.
- d. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan investasi terutama pada sektor industri Kalbar. Minimnya infrastruktur pendukung di Kalbar merupakan salah satu penghambat dalam peningkatan investasi saat ini. Tanpa adanya infrastruktur pendukung, permasalahan efisiensi produksi akan selalu digaungkan calon investor yang akan berinvestasi di Kalbar.

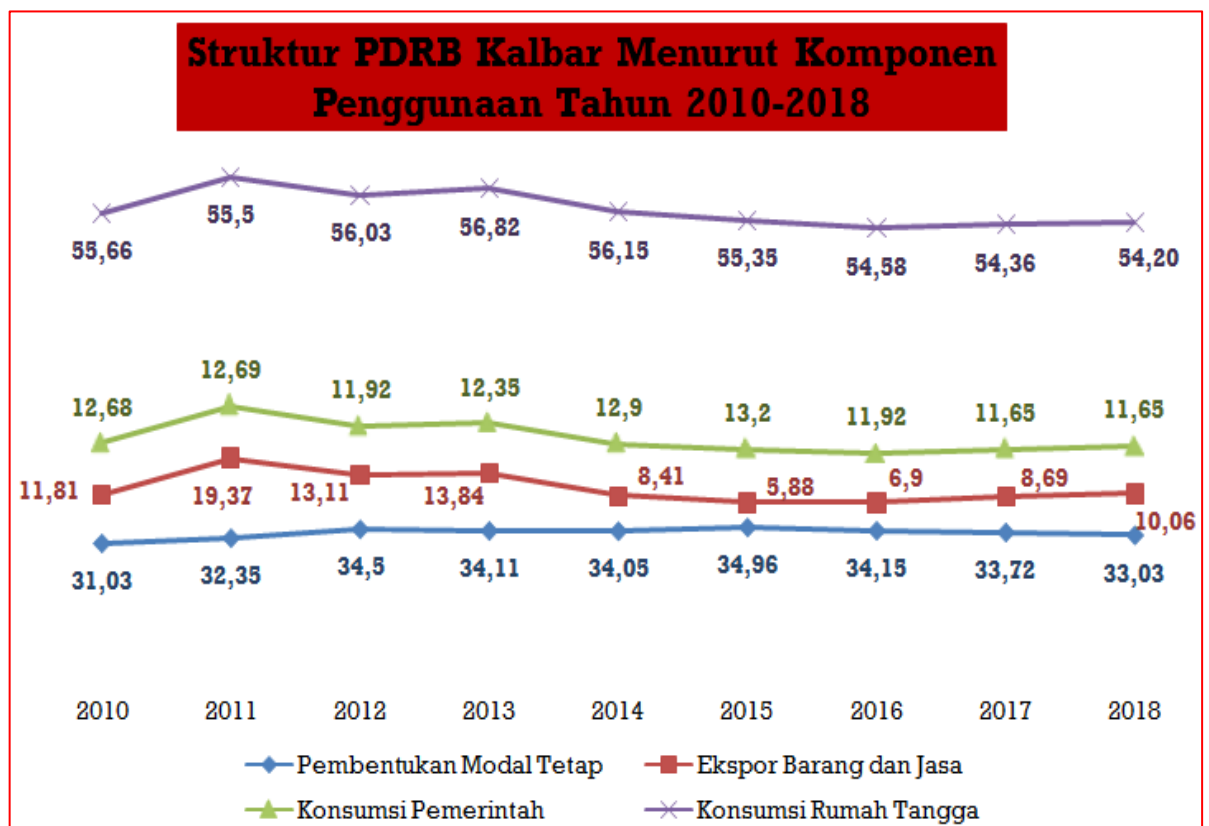
➤ **Peluang :**

- a. Kekayaan SDA yang ada di Kalbar belum dimanfaatkan secara optimal (hilirisasi). Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat nomot 1 Tahun 2017, terdapat 7 (tujuh) komoditi unggulan yang telah ditetapkan yaitu : Industri Pengolahan Karet; Industri Pengolahan Sawit; Industri Pengolahan Kelapa; Industri Pengolahan Bauksit; Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan; Industri Pengolahan Kayu; dan Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
- b. Pembangunan Pelabuhan Internasional Temajok yang saat ini sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan angin segar bagi sektor industri Kalbar. Hal tersebut memungkinkan bagi pengusaha untuk dapat melakukan ekspor tanpa harus melalui daerah lainnya.
- c. Sebagai langkah dalam penyiapan infrastruktur dasar serta kemudahan berinvestasi, Pemda Kalbar juga gencar mendorong rencana pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra IKM agar dapat segera terealisasi. Diharapkan dengan terbangunnya perwilayahan industri di Kalbar akan menarik investor yang ingin berinvestasi di Kalbar dengan menawarkan kemudahan berinvestasi di dalam perwilayahan industri.
- d. Perkembangan era teknologi yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang dapat diambil. Kemudahan bertansaksi serta hilangnya batasan antar wilayah menjadi peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri khususnya bagi pelaku IKM Kalbar.

• **Sektor Perdagangan**

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah terjadi pada tahun 2016 lalu memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan perdagangan Kalbar. Kemudahan perdagangan antar negara Asean di satu sisi membuka peluang bagi produk Kalbar agar dapat lebih dikenal. Namun pada sisi lainnya, minimnya daya saing produk menyebabkan lebih banyak produk asing yang masuk dibandingkan produk yang keluar. Hal tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan IKM terutama IKM Kalbar yang dikhawatirkan akan semakin tergerus oleh penggunaan produk luar negeri. Hal tersebut juga berlaku pada wilayah perbatasan Kalbar dimana kondisi saat ini lebih banyak produk luar yang digunakan apabila dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal tersebut membutuhkan peran pemerintah dalam memberikan solusi yang baik bagi masyarakat perbatasan Kalbar.

Gambar 1. Struktur Komponen Penggunaan dalam PDRB Kalbar Tahun 2018



Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Berdasarkan gambar 9 diatas, besarnya konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 50% merupakan sebuah peluang sekaligus ancaman bagi penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam memberdayakan produk dalam negeri sehingga diharapkan konsumsi rumah tangga tersebut adalah mayoritas

produk dalam negeri. Secara umum, tantangan dan peluang pada sektor perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Tantangan :**

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal dalam rangka mencegah maraknya penggunaan produk luar negeri. Hal tersebut juga berlaku pada daerah perbatasan dimana dibutuhkan kebijakan khusus agar harga produk dalam negeri dapat terjangkau.
- b. Pembangunan Pelabuhan Internasional Temajok yang saat ini sedang berlangsung memerlukan komoditi yang akan diperdagangkan. Keterbukaan terhadap pasar dunia mewajibkan pemerintah daerah harus jeli dalam memanfaatkan hal tersebut sehingga diharapkan barang yang keluar akan lebih banyak apabila dibandingkan dengan barang yang masuk.
- c. Perluasan pangsa pasar khususnya produk Kalbar sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi dan ekspor Kalbar. Peran Pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan akses pasar yang sejalan dengan peningkatan kualitas produk ekspor.

➤ **Peluang :**

- a. Besarnya potensi peningkatan Ekspor Kalbar dengan terbangunnya Pelabuhan Internasional Temajok.
- b. Kalbar memiliki 5 (lima) wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal tersebut memberikan peluang sekaligus ancaman bagi perdagangan daerah. Perlunya perhatian khusus agar produk daerah dapat lebih berinovasi sehingga dapat berdaya saing dengan produk luar negeri.
- c. Pentingnya pembangunan marketing point pada Pos Lintas Batas (PLB) yang diharapkan dapat menjadi etalase nasional dalam memperkenalkan produk nasional khususnya Kalbar yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan lintas batas negara.
- d. Perkembangan era teknologi yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang dapat diambil. Kemudahan bertansaksi serta hilangnya batasan antar wilayah menjadi peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri.

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan se Kalbar yang sekaligus merupakan Forum OPD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menjaring usulan kegiatan, permasalahan, peluang, solusi yang ingin dicapai, serta penyamaan persepsi dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan Kalbar secara umum dan setiap Kabupaten/Kota secara khususnya. Usulan-usulan tersebut kemudian ditelaah serta disusun menjadi kegiatan pada Rencana Kerja OPD Pada Tahun 2020.

Namun berdasarkan hasil penelaahan, terdapat kendala yang ditemui sehingga usulan-usulan tersebut selanjutnya tidak hanya diarahkan untuk masuk pada Renja OPD namun juga disulkan pada Musrenabang Provinsi, Musrenabang Nasional, maupun mekanisme DAK Kementerian. Beberapa kendala serta kebijakan yang diambil antara lain :

- Banyaknya usulan terkait dengan bantuan peralatan bagi IKM. Dengan minimnya penganggaran OPD sehingga usulan tersebut selanjutnya diarahkan untuk diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Nasional dan DAK Kementerian;
- Usulan terkait pelatihan di Kabupaten/Kota kembali ditelaah untuk masuk kedalam Renja OPD. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Perda Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 2017 tentang RPIP Kalbar 2017-2037 dimana pelatihan IKM diarahkan pada 7 (tujuh) Komoditi Unggulan Kalbar. Usulan-usulan tersebut selanjutnya juga diarahkan pada Musrenabang Provinsi dan Musrenabang Nasional;
- Usulan Pembangunan/Revitalisasi pasar diarahkan pada mekanisme DAK Kementerian sesuai dengan persyaratan pengusulan.
- Usulan pengawasan barang beredar tidak dapat mengakomodir keseluruhan daerah. Hal tersebut kedepannya diharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya sehingga dapat efektif dan efisien.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat UU no. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang sejalan dengan RPJPN yang merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Selain itu juga diamanatkan bahwa setiap Gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat telah mendorong tersusunnya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang telah ditetapkan melalui Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2037. Disperindag Prov. Kalbar juga mendorong disusunnya Perda tentang Rencana Pemangunan Industri Kabupaten/ Kota.

Pada bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sektor Perdagangan 2015-2019 yaitu Pembangunan 5000 Pasar Rakyat dalam 5 (lima) Tahun, Perlindungan Konsumen, Stabilisasi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Peningkatan Ekspor Non Migas dan Jasa. Dalam rangka mendukung kebijakan pusat ini, Dinas Perindag Prov. Kalbar telah menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan tersebut. Beberapa Program yang mendukung kebijakan tersebut yaitu Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor, Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang didalamnya terdapat kegiatan yang selaras dengan Kebijakan Pusat seperti Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengawasan Barang Beredar, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota, Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindodan BIMP-EAGA) dan Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dituangkan pada Rencana Kerja tahun 2020 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada Misi ke- 4 yaitu : **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan **mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor** pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan **sektor industri pengolahan**.

Tujuan berdasarkan dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Meningkatkan perekonomian Masyarakat Kalimantan Barat yang Merata dan Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan indikator Kinerja Daerah adalah **Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,15%** pada akhir periode tahun 2018-2023.

Pada RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa salah satu isu strategis daerah terkait dengan perindustrian dan perdagangan yaitu belum optimalnya peranan perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Sedangkan sasaran pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15% pada akhir periode tahun 2018-2023 dengan indikator pendukung yaitu **Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB sebesar 8%**, serta **Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB sebesar 6,5%** pada akhir periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Dari hal – hal tersebut di atas Dinas Perindustrian mengemukakan 2 (dua) isu strategis yaitu Belum Optimalnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Kinerja Perdagangan Luar Negeri Daerah dan Masih lambatnya revitalisasi (kontribusi industri pada PDRB) dan daya saing industri Kalbar.

No.	Isu Strategis	Keterangan
1	2	3
<i>RPJMD Prov. Kalbar 2019 – 2023</i>		
1	Peranan Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terhadap Perekonomian Kalbar masih belum Optimal	Isu Strategis Daerah pada Rancangan RPJMD prov. Kalbar 2019 - 2023
<i>Renstra Disperindag Prov. Kalbar 2019 - 2023</i>		
1	Masih lambatnya revitalisasi dan daya saing industri Kalbar	Isu Strategis Disperindag urusan perindustrian
2	Belum Optimalnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Kinerja Perdagangan Luar Negeri Daerah	Isu Strategis Disperindag urusan perdagangan

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan serta Perkiraan Dana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

Rencana Kerja tahun 2020 dibagi ke dalam tiga pengelolaan yaitu yang dikelola oleh Dinas itu sendiri berjumlah Rp. 9.621.011.400, UP IPOK sebesar Rp. 2.332.298.000, serta UP PSMB sebesar Rp. 3.465.000.000. dari sejumlah pagu indikatif tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu untuk kegiatan rutin atau penunjang dan kegiatan teknis atau kegiatan inti (terlampir).

Rencana Program dan Kegiatan inti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar Tahun 2021 beserta dana yang dibutuhkan dan output kinerjanya dapat dilihat pada [lampiran](#) Renja 2021 ini, dimana fokus urusan industri pada tahun 2021 adalah :

1. Mendorong Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten
2. Penumbuhan dan penguatan IKM daerah
 - a) pelatihan Teknis & Kewirausahaan
 - b) Pengembangan Kemasan
 - c) Promosi IKM
3. Penumbuhan dan Pengembangan industri unggulan
4. Hilirisasi industri sawit dan karet
5. Aplikasi Sistem Informasi Industri daerah
6. Penumbuhan dan pengembangan Perwilayahan Industri
7. Peningkatan kompetensi SDM/Industri
8. Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
9. Penyusunan Dokumen Investasi serta Kerjasama
10. Pendampingan, Monev Penyusunan RPIK

Selanjutnya kebutuhan anggaran pada tahun 2020 untuk setiap program adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2021
DILINGKUNGANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI
KALBAR(URUSAN PERINDUSTRIAN)**

No	Program	Kebutuhan dana	
1	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	Rp.	5.758 Juta (APBD)
	1.1. Dinas	Rp.	3 3.425 Juta (APBD)
	1.2. Operasional dan pelayanan UP IPOK	Rp.	2.332 Juta (APBD)
Total kebutuhan pembiayaan urusan perindustrian		Rp.	5.758 Juta (Pagu Indikatif APBD)

Selanjutnya fokus pengembangan urusan perdagangan Kalbar 2021 adalah :

1. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH (dukungan pengembangan sarana dan prasarana distribusi;pasar, gudang di kab/kota)
2. Peningkatan dan pemberdayaan perlindungan konsumen termasuk pengawasan barang beredar & Menggalakan konsumen cerdas, serta operasional BPSK di Kabupaten/Kota yang telah dibentuk dan menjadi kewenangan Provinsi.
3. Antisipasi fluktuasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting (termasuk pasar murah pd menjelang hari besar keagamaan)
4. Promosi dagang dan misi dagang dalam negeri yang selektif
5. Peningkatan koordinasi dan arus informasi antar stakeholder dlm peningkatan kinerja ekspor daerah
6. Penguatan data base perdagangan luar negeri dan dalam negeri (importir & eksportir)
7. Pengembangan kerjasama regional bidang ekonomi
8. Pembinaan dan pengembangan perdagangan lintas batas
9. Peningkatan kapasitas pelayanan Unit Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (UPSMB)

Selanjutnya kebutuhan anggaran pada tahun 2021 untuk setiap program urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.RINGKASAN PROGRAM DAN PAGU INIDIKATIF TAHUN 2019DILINGKUNGANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI KALBAR(URUSAN PERDAGANGAN)

No.	PROGRAM		PAGU DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Rp.	6.134 Juta (APBD)
2	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI		
	2.1. Dinas	Rp	2.669 Juta (APBD)
	2.2. Operasional dan pelayanan UPSMB	Rp.	3.465 Juta (APBD)
Total pagu pembiayaan Program Utama Urusan Perdagangan		Rp.	6. 109 Juta (Pagu Indikatif APBD)

Sedangkan untuk program-program rutin Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN PROGRAM RUTIN

Program	Pagu Indikatif 2019
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	2.229.425.400
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	652.805.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur	0
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	226.084.500
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	398.288.500
6. Program peningkatan pengelolaan asset daerah	19.236.000

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2021, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Perindag Tahun 2019-2023. Keterkaitan antara Indikator kinerja serta program dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2. Rencana Target Kinerja Tahun 2021

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	7	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Ket : - Berdasarkan Renstra 2019-2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar

PERALIHAN

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dilaksanakannya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah mengharuskan adanya migrasi dari format rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya ke dalam format Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 90 yang disahkan di bulan Oktober 2019 dah telah harus diterapkan pada tahun 2020 sebagai dasar penyusun Rencana Kerja tentunya membawa perubahan yang sangat signifikan. Di tengah minimnya sosialisasi serta pengetahuan terhadap system yang baru tersebut kami berusaha Melakukan penyesuaian dari rencana kerja dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tentunya acuan yang digunakan pada penyusunan Renja ini adalah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023. Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan (mapping) program kegiatan dalam format lama ke nomenklatur program kegiatan dalam Permendagri 90, sebagaimana terlampir.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan untuk kegiatan 1 tahun ke depan yaitu untuk tahun 2021. Penyusunan ini dilaksanakan pada saat Permen 90 Tahun 2019 pertama kali diterapkan untuk penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan APBD. Tentunya renja yang disusun ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas tahun 2019-2023 yang dibreakdown setiap tahun. Berlakunya Permen 90 dengan format yang berbeda dengan sebelumnya tentu disikapi dengan melakukan pemetaan program kegiatan yang telah disusun dengan nomenklatur program kegiatan yang terdapat pada permen 90.

Semoga Dokumen Renja tahun 2021 yang disusun ini dapat memberikan pedoman atau setidaknya dapat memberikan gambaran secara runut proses migrasi dari Permendagri 33 tahun 2019 ke Permendagri 90 tahun 2019.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			15.418.309.400,00		18.078.442.000,00
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			9.621.011.400,00		10.459.842.000,00
2.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		2.229.425.400,00		2.640.342.000,00
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	120 Berkas	1.200.000,00	Pontianak	4.500.000,00
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Jenis	381.000.000,00	Pontianak	420.000.000,00
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	2 Polis	24.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	10 Unit	25.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	1 tahun	11.260.000,00	Pontianak	12.000.000,00
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	198.700.000,00	Pontianak	230.000.000,00
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	50 Jenis	58.100.500,00	Pontianak	135.000.000,00
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	57.725.000,00	Pontianak	95.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	17.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	25 Jenis	25.789.900,00	Pontianak	16.000.000,00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1 tahun	40.000.000,00	Pontianak	46.000.000,00
2.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 dokumen	170.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	220.000.000,00
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	30 orang	951.000.000,00	Pontianak	1.047.842.000,00
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	17 Orang	134.700.000,00	Pontianak	138.000.000,00
2.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 tahun	35.000.000,00	Pontianak	31.000.000,00
2.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	200 M2	83.950.000,00	Pontianak	85.000.000,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		652.805.000,00		486.000.000,00
2.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	189.300.000,00	Pontianak	180.000.000,00
2.06.01.01.02.13	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah peralatan pendukung	2 unit	4.350.000,00	Pontianak	
2.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	70.850.000,00	Pontianak	
2.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	8 Unit	49.960.000,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	46 Unit	23.600.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	111 Unit	27.800.000,00	Pontianak	31.000.000,00
2.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	19 Unit	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	3 Jenis	133.945.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	jumlah mebelair	3 jenis	98.000.000,00	pontianak	
2.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik/Telepon	1 tahun	35.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
2.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		0,00		80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	114 Stel	0,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	114 Stel	0,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	114 Buah	0,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		226.084.500,00		397.500.000,00
2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	TPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	180.000.000,00
2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15 Orang	25.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	16 Dokumen	76.531.000,00	Pontianak	92.500.000,00
2.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kegiatan Jasmani dan Rohani	32 Kali	62.960.000,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja OPD	1 Dokumen	11.593.500,00	Pontianak	10.000.000,00
2.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		398.287.500,00		621.000.000,00
2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	5 Dokumen	18.949.000,00	Pontianak	27.000.000,00
2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP OPD	1 Dokumen	20.775.000,00	Pontianak	21.000.000,00
2.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja OPD	1 Dokumen	26.775.000,00	Pontianak	30.000.000,00
2.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	23.145.000,00	Pontianak	26.000.000,00
2.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Monev	1 Dokumen	55.500.000,00	Pontianak	70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen	35.298.500,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	106.395.000,00	Pontianak dan Luar Daerah	320.000.000,00
2.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	51.900.000,00	Pontianak	52.000.000,00
2.06.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Aplikasi	59.550.000,00	Pontianak	40.000.000,00
2.06.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		19.236.500,00		25.000.000,00
2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	19.236.500,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan		745.943.000,00		610.000.000,00
2.06.01.01.15.03	Pembinaan, monitoring, dan evaluasi importir	Focus Group Discussion terkait data dan kinerja impor kalbar	4 kali pertemuan, 1 dokumen monev	40.000.000,00	pontianak	
2.06.01.01.15.07	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	partisipasi Promosi dagang ekspor di dalam dan luar negeri	2 lokasi	242.050.000,00	PLBN ARUK san Entikong	0,00
2.06.01.01.15.16	Designer Dispatch Service (DDS) Bagi IKM	Jumlah Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	209.820.000,00	Pontianak	260.000.000,00
2.06.01.01.15.31	Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengelolaan Impor	Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar	4 Kali Pertemuan	40.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.15.33	Promosi Dagang Ekspor di Dalam dan Luar Negeri	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	1 Event	214.073.000,00	Tangerang	260.000.000,00
2.06.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Inflasi Bahan Makanan (%)		1.923.356.500,00		2.000.000.000,00
2.06.01.01.16.04	Pameran Dalam Negeri	produk lokal kalbar yang dipromosikan	8 produk	98.992.000,00	pontianak, KKR, Mempawah	98.992.000,00
2.06.01.01.16.05	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Pelaksanaan Pasar Murah Pada Hari Besar Keagamaan	10 Kali	926.476.500,00	Pontianak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sintang, Landak, Sanggau	470.000.000,00
2.06.01.01.16.06	Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi	data perdagangan PAP, updating kerjasama PAP (APPSI)	1 dokumen	98.673.000,00	Pontianak, sambas, ketapang dan Luar Kalbar	110.000.000,00
2.06.01.01.16.07	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Data Ketersediaan Stok Bapokting	1 tahun 14 kab/kota	160.904.000,00	se kalbar	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.16.08	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN	Rapat Stabilitas Bapokting Menjelang HBKN	2 Kali	94.516.000,00	Pontianak	130.000.000,00
2.06.01.01.16.10	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan	Data Bapok dan Sarana Perdagangan	2 Jenis Data	147.940.000,00	kalimantan barat	210.000.000,00
2.06.01.01.16.11	Pengawasan Barang Beredar	Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota	2 jenis komoditi (garam dan minyak goreng)	115.046.000,00	sambas, kayong utara, sanggau	240.000.000,00
2.06.01.01.16.14	Pengawasan di bidang Perdagangan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	5 kabupaten / kota	93.709.000,00	pontianak, kubu raya, sambas, ketapang	130.000.000,00
2.06.01.01.16.15	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	BPSK Yang Dibina dan Monev	4 BPSK	49.800.000,00	Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang, Bengkayang dan Kubu Raya	120.000.000,00
2.06.01.01.16.17	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan	Dokumen Updating Data Sarana Perdagangan dan rekomendasi pembangunan / revitalisasi pasar rakyat	1 Dokumen	137.300.000,00	kalimanta barat	210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitas Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ;		3.425.873.000,00		3.600.000.000,00
2.06.01.01.17.67	Pendampingan, Monitoring dan evaluasi Tahapan penyusunan dan Pelaksanaan RPIP dan RPIK	Dokumen Monitoring Tahapan Penyusunan RPIK, Rekomendasi Pelaksanaan RPIK, dan Rekomendasi Program dan Kegiatan Sesuai dengan RPIP	2 Dokumen	106.264.000,00	Kapuas Hulu, Bengkayang, pontianak	150.000.000,00
2.06.01.01.17.69	Monitoring dan evaluasi percepatan promosi investasi industri	Dokumen Monev Percepatan Promosi Investasi Industri	1 Dokumen laporan monev	41.080.000,00	landak dan ketapang	70.000.000,00
2.06.01.01.17.72	Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri	Dokumen Pengembangan Kerjasama Industri	6 naskah /dokumen	152.426.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.06.01.01.17.75	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan Pengawasan	40 Perusahaan	141.311.000,00	Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ketapang, Pontianak	170.000.000,00
2.06.01.01.17.76	Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri	Sumber Daya Manusia Industri yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	207.732.000,00	Surabaya, Medan, makasar	300.000.000,00
2.06.01.01.17.77	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri	Dokumen Monev Pemanfaatan SDA Industri	6 Dokumen	109.670.000,00	14 kab/kota	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.17.78	Identifikasi potensi SDA unggulan daerah	Dokumen Potensi SDA Unggulan Daerah	3 Dokumen	285.175.000,00	sambas, singkawang, ketapang	210.000.000,00
2.06.01.01.17.80	Pendampingan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	30 Pelaku IKM	297.805.000,00	Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya	320.000.000,00
2.06.01.01.17.81	Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Menjadi WUB IKM Unggulan Provinsi	60 WUB	200.000.000,00	Kubu Raya, Kapuas Hulu Kayong Utara sekadau	140.000.000,00
2.06.01.01.17.82	Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi	Partisipasi pada Promosi Industri	2 Event	372.887.000,00	Jakarta dan Pontianak	390.000.000,00
2.06.01.01.17.83	Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi	IKM Unggulan Provinsi yang Diberikan Pendampingan dan Pemberdayaan	60 IKM	250.000.000,00	Se Kalbar	200.000.000,00
2.06.01.01.17.86	Peningkatan Kualitas Produk IKM Kalimantan Barat	IKM Unggulan Kalbar yang Diberikan Pembinaan	80 IKM	279.995.000,00	sanggau, sambas, mempawah, sintang	320.000.000,00
2.06.01.01.17.87	Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar	Perusahaan yang Diberikan Pembinaan dan Diawasi Terkait Penerapan Standarisasi Industri	40 Perusahaan	148.890.000,00	pontianak, ketapang, kubu raya, sanggau, sekadau	120.000.000,00
2.06.01.01.17.89	Pembuatan Peta Spasial industri Kalbar	Peta Spasial Industri Kalbar	1 Peta Spasial	65.757.000,00	Kab/ Kota Se-Kalbar	120.000.000,00
2.06.01.01.17.90	Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Perusahaan yang Diberikan Pembinaan Dalam Penggunaan FGD SIINAS	1 event, 40 Perusahaan	143.882.500,00	Se Kalbar	60.000.000,00
2.06.01.01.17.91	Kontes produk IKM Kalimantan Barat	Kontes produk IKM	1 Event	162.610.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.17.92	Penyusunan Bahan Promosi Investasi Industri	Bahan Promosi Investasi Industri	1 aplikasi	102.461.000,00	Pontianak	220.000.000,00
2.06.01.01.17.96	Pengembangan Tahapan Pembangunan Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri yang Dikembangkan	4 kawasan industri dan 1 Sentra IKM	222.670.000,00	Landak, Ketapang, Sanggau, Sambas, Pontianak	320.000.000,00
2.06.01.01.17.97	Pemutakhiran Data Industri	Dokumen Data Industri yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	135.257.500,00	Se Kalbar	210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02	UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN			2.332.298.000,00		2.162.300.000,00
2.06.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		385.550.000,00		393.300.000,00
2.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 rekening	65.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 polis	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
2.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	2 unit	1.650.000,00	Pontianak	1.000.000,00
2.06.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	600 lembar	3.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
2.06.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 unit	85.600.000,00	Pontianak	86.000.000,00
2.06.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	42 jenis	37.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
2.06.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	eksemplar	22.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
2.06.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11 buah	5.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
2.06.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 item	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	600 porsi	9.000.000,00	Pontianak	9.000.000,00
2.06.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	15 dokumen	70.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.06.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 orang	60.300.000,00	Pontianak	60.300.000,00
2.06.01.02.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	Dokumen/m2	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		631.296.000,00		605.000.000,00
2.06.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	2 unit	30.000.000,00		20.000.000,00
2.06.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 unit	70.000.000,00	Pontianak	87.000.000,00
2.06.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 jenis	0,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 unit	60.950.000,00		15.000.000,00
2.06.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 mobil, 1 motor	14.996.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	15 unit	13.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00
2.06.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	15 unit	4.800.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	3 unit	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pelengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	3 unit	303.000.000,00	Kota Pontianak	350.000.000,00
2.06.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebeulair	3 jenis	54.000.000,00	Kota Pontianak	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/telpon yang terpelihara	4 jenis	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Bangunan Khusus /Gedung Khusus Yang Terpeliharanya	5 Unit	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang dipelihara	1 unit	10.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana kantor serta Penunjang	1 unit	40.550.000,00		20.000.000,00
2.06.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		67.000.000,00		177.000.000,00
2.06.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	40.000.000,00	Dalam dan luar Kalbar	150.000.000,00
2.06.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	65 orang	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
2.06.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 dokumen	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
2.06.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah perjanjian kinerja	1 dokumen	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
2.06.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		50.000.000,00		50.000.000,00
2.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 laporan	16.000.000,00	Pontianak	16.000.000,00
2.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 dokumen	8.000.000,00	Pontianak	8.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
2.06.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	14.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
2.06.01.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		10.000.000,00		10.000.000,00
2.06.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 dokumen	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
2.06.01.02.17	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA		1.188.452.000,00		927.000.000,00
2.06.01.02.17.48	Lomba Desain Kemasan Produk Olahan Pangan	Jumlah IKM yang mengikuti lomba desain kemasan produk olahan pangan	30 unit usaha	70.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.02.17.49	Lomba Cipta Kreasi Olahan Pangan Lokal	peserta Lomba Cipta Kreasi Olahan Pangan Lokal	28 orang	160.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.02.17.50	Penerapan GMP bagi IKM Industri Pangan Olahan	jumlah unit usaha yang berpartisipasi	24 ikm	63.414.000,00	Sanggau, Sintang, Mempawah, Kayong, Singkawang, Sambas	70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.17.51	Bimbingan Pengolahan Pangan dan Kemasan Kue Kering	jumlah peserta	40 ikm	97.772.000,00	Mempawah dan Kubu Raya	0,00
2.06.01.02.17.55	Forum Diseminasi Rumah Kemasan bagi Pelaku IKM	jumlah peserta	50 ikm	125.700.000,00	Pontianak	125.000.000,00
2.06.01.02.17.56	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	jumlah ikm yang berpartisipasi	30 ikm	199.764.000,00	Sambas, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Sekadau, Bengkayang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu	130.000.000,00
2.06.01.02.17.57	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	jumlah produk	50 produk	271.802.000,00	14 Kab/Kota	290.000.000,00
2.06.01.02.17.58	Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Kemasan Produk	jumlah unit usaha yang difasilitasi	80 ikm	150.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
2.06.01.02.17.59	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Desain dan Kemasan Produk	jumlah produk yang difasilitasi	0	0,00	-	162.000.000,00
2.06.01.02.17.60	Pelayanan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	jumlah ikm yang difasilitasi	0	0,00	-	0,00
2.06.01.02.17.61	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis HasilPertanian dan Agro	jumlah ikm yang berpartisipasi	20 ikm	50.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			3.465.000.000,00		5.456.300.000,00
2.06.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		619.949.000,00		709.800.000,00
2.06.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	120 Berkas	10.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
2.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jenis	150.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
2.06.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	2 Polis	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	2.800.000,00	Pontianak	4.500.000,00
2.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Check	707 materai dan 8 buku	5.200.000,00	Pontianak	6.500.000,00
2.06.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	3 Orang	130.650.000,00	Pontianak	150.000.000,00
2.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 jenis	62.079.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	62000 Eksemplar	42.500.000,00	Pontianak	45.000.000,00
2.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.05.01.11	penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	5 jenis	43.920.000,00	Pontianak	
2.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 Terbitan	1.500.000,00	Pontianak	1.500.000,00
2.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	750 Porsi	43.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
2.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	5 Dokumen	30.000.000,00	Luar Daerah	100.000.000,00
2.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan barang	9 Orang	63.300.000,00	Pontianak	63.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		1.930.365.000,00		3.463.000.000,00
2.06.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	AC dan Exhaust Fan	4 unit	15.300.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan kantor	6 Unit	48.650.000,00	pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.10	pengadaan/peningkatan instalasi listrik / telepon	instalasi listrik	16500 KV	25.650.000,00		
2.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 unit	104.650.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus yang Terpelihara	1 unit	156.650.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas/Operasional	4 unit	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	20 unit	13.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor	61 unit	17.550.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	3 jenis	12.200.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.05.02.33	pembangunan pagar	pagar	313 m2	215.150.000,00	Pontianak	
2.06.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Perlengkapan/Peralatan Khusus /Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	4 jenis	936.465.000,00	Pontianak	3.000.000.000,00
2.06.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	meubeler	2 jenis	38.150.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	1 paket	75.650.000,00	Pontianak	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	1 paket	50.650.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 paket	50.650.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Perlengkapan/Peralatan gedung khusus/bangunan khusus/Gedung khusus	93 unit	100.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
2.06.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	generator	1 unit	20.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
2.06.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		30.500.000,00		52.000.000,00
2.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	30 stel	25.500.000,00	pontianak	52.000.000,00
2.06.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	30 buah	5.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		113.782.000,00		195.000.000,00
2.06.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	75.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	120.000.000,00
2.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 orang	30.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	75.000.000,00
2.06.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 dokumen	8.782.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		83.849.000,00		86.500.000,00
2.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	5 dokumen	24.173.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP UPT	1 dokumen	17.337.000,00	Pontianak	17.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusnya Renja UPT	1 dokumen	18.629.000,00	Pontianak	19.000.000,00
2.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusnya RKA dan DPA	2 dokumen	23.710.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan		686.555.000,00		950.000.000,00
2.06.01.05.15.17	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	Jumlah Sampel Pengujian Mutu	63 sampel	42.163.000,00	mempawah, singkawang, bengkayang, sambas	80.000.000,00
2.06.01.05.15.18	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	Jumlah Sampel Pengujian Mutu Komoditi Unggulan	18 sampel	41.373.000,00	sekadau, sanggau, sintang, landak	80.000.000,00
2.06.01.05.15.19	Peningkatan pelayanan pengujian mutu produk/barang	Pengujian Mutu Produk/Barang	265 sampel	25.250.000,00	Pontianak	30.000.000,00
2.06.01.05.15.20	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	Jumlah Pelayanan Kalibrasi Peralatan Pelanggan	500 alat	29.954.000,00	14 kab/kota dan Luar Daerah	35.000.000,00
2.06.01.05.15.21	Kalibrasi Peralatan Standard	Jumlah Alat Kalibrasi Peralatan Standard	55 alat	107.340.000,00	Dalam dan Luar Daerah	130.000.000,00
2.06.01.05.15.22	Promosi Pelayanan UPT. PSMB	Jumlah Costumer Pengujian dan Kalibrasi	5 Costumer Pengujian 15 Costumer Kalibrasi	43.350.000,00	sanggau, landak, bengkayang, singkawang	80.000.000,00
2.06.01.05.15.23	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	Evaluasi Sistem Manajemen ISO : 17025	3 kegiatan	27.675.000,00	Pontianak	40.000.000,00
2.06.01.05.15.24	Audit Eksternal	Audit Eksternal	2 laboratorium	144.300.000,00	Pontianak	150.000.000,00
2.06.01.05.15.25	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	Jumlah Jenis Pengujian dan Kalibrasi	11 jenis uji dan 23 jenis ukur	54.949.000,00	Pontianak	65.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.15.26	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	Koordinasi Jejaring Pengelolaan Laboratorium	3 pertemuan	28.538.000,00	Luar daerah	110.000.000,00
2.06.01.05.15.28	Pengembangan Laboratorium Pengujian	Pengembangan Laboratorium	1 layanan	141.663.000,00	Pontianak	150.000.000,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR TAHUN 2021
DAN PEMETAAN KE DALAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 (pemutakhiran)**

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				9.621.010.400,00			
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.129.375.400,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	120 Berkas	DAU	1.200.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	4 Jenis	DAU	279.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pontianak	2 Polis	DAU	24.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pontianak	10 Unit	DAU	15.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	1 tahun	DAU	8.560.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pontianak	1 tahun	DAU	198.700.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pontianak	50 Jenis	DAU	58.100.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	1 tahun	DAU	57.725.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	3 Jenis	DAU	17.250.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pontianak	25 jenis	DAU	25.789.900,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	1 tahun	DAU	15.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	1 tahun	DAU	40.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 dokumen	DAU	170.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pontianak	30 orang (honor tenaga kontrak)	DAU	951.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	17 Orang	DAU	149.100.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	1 tahun	DAU	35.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Pontianak	200 M2	DAU	83.950.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penataan dan Pemeliharaan Arsip
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				653.445.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pontianak	3 Jenis	DAU	198.300.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pontianak	1 unit	DAU	115.850.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pontianak	4 Unit	DAU	50.850.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pontianak	50 Unit	DAU	28.800.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pontianak	111 Unit	DAU	32.150.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pontianak	1 tahun	DAU	15.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pontianak	3 Jenis	DAU	133.945.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Mebelair	pontianak	27 unit	DAU	48.550.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pontianak	1 tahun	DAU	30.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				226.084.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	10 Orang	DAU	50.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	15 Orang	DAU	25.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Pontianak	16 Dokumen	DAU	76.531.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pontianak	31 Kali	DAU	62.960.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Jasmani dan Rohani
Penyusunan Penetapan Kinerja	Pontianak	1 Dokumen	DAU	11.593.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan Penetapan Kinerja

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				483.010.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Penyusunan Laporan Keuangan	Pontianak	25 Dokumen	DAU	103.672.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Penyusunan LAKIP	Pontianak	1 Dokumen	DAU	20.775.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Penyusunan RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	DAU	26.775.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Dokumen	DAU	23.145.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pontianak	1 Dokumen	DAU	55.500.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen	DAU	35.298.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Pontianak dan Luar Daerah	1 Dokumen		106.395.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Pontianak	1 Dokumen		51.900.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	1 Aplikasi	DAU	59.550.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				33.922.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Pontianak	2 Dokumen	DAU	33.922.500,00			
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				745.943.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Pembinaan, monitoring, dan evaluasi importir	pontianak	4 kali pertemuan, 1 dokumen money	DAU	40.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	PLBN ARUK dan Entikong	2 lokasi	DAU	242.050.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran Dagang Internasional/Nasional

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Designer Dispatch Service (DDS) Bagi IKM	Pontianak	10 Pelaku Usaha		209.820.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor
Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengelolaan Impor	Pontianak	4 Kali Pertemuan		40.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Promosi Dagang Ekspor di Dalam dan Luar Negeri	Tangerang	1 Event	DAU	214.073.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran Dagang Internasional/Nasional

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA				1.923.356.500,00			
Pameran Dalam Negeri	pontianak, KKR, Mempawah	8 produk	DAU	98.992.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Pontianak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sintang, Landak, Sanggau	10 Kali	DAU	926.476.500,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi	Pontianak, sambas, ketapang dan Luar Kalbar	1 dokumen	DAU	98.673.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	se kalbar	1 tahun 14 kab/kota	DAU	160.904.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN	Pontianak	2 Kali	DAU	94.516.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan	kalimantan barat	2 Jenis Data	DAU	147.940.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
Pengawasan Barang Beredar	sambas, kayong utara, sanggau	2 jenis komoditi (garam dan minyak goreng)	DAU	115.046.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengawasan di bidang Perdagangan	pontianak, kubu raya, sambas, ketapang	5 kabupaten / kota	DAU	93.709.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang,	4 BPSK	DAU	49.800.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan	kalimantan barat	1 Dokumen	DAU	137.300.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI				3.425.873.000,00			
Pendampingan, Monitoring dan evaluasi Tahapan penyusunan dan Pelaksanaan RPIP dan RPIK	Kapuas Hulu, Bengkayang, pontianak	2 Dokumen	DAU	106.264.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Monitoring dan evaluasi percepatan promosi investasi industri	landak dan ketapang	1 Dokumen laporan movev	DAU	41.080.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri	Pontianak	6 naskah /dokumen	DAU	152.426.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri	Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ketapang, Pontianak	40 Perusahaan	DAU	141.311.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi
Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri	Surabaya, Medan, makasar	120 Orang	DAU	207.732.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri	14 kab/kota	6 Dokumen	DAU	109.670.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Identifikasi potensi SDA unggulan daerah	sambas, singkawang, ketapang	3 Dokumen	DAU	285.175.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
Pendampingan dan Pemanfaatan Teknolgi Industri	Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya	30 Pelaku IKM	DAU	297.805.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Penumbuhan Wirasaha Baru IKM Unggulan Provinsi	Kubu Raya, Kapuas Hulu Kayong Utara sekadau	80 WUB	DAU	200.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi	Jakarta dan Pontianak	2 Event	DAU	372.887.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi	Se Kalbar	60 IKM	DAU	250.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Peningkatan Kualitas Produk IKM Kalimantan Barat	sanggau, sambas, mempawah, sintang	80 IKM	DAU	279.995.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar	pontianak, ketapang, kubu raya, sanggau, sekadau	40 Perusahaan	DAU	148.890.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Pembuatan Peta Spasial industri Kalbar	Kab/ Kota Se-Kalbar	1 Peta Spasial	DAU	65.757.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Se Kalbar	1 event, 60 perusahaan, 12 bulan pelayanan dan pendampingan	DAU	143.882.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
Kontes produk IKM Kalimantan Barat	Pontianak	1 Event	DAU	162.610.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Permendagri 90		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Bahan Promosi Investasi Industri	Pontianak	1 aplikasi		102.461.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Pengembangan Tahapan Pembangunan Perwilayahan Industri	Landak, Ketapang, Sanggau, Sambas, Pontianak	4 kawasan industri dan 1 Sentra IKM		222.670.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
Pemutakhiran Data Industri	Se Kalbar	1 Dokumen		135.257.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan serta data lain lingkup provinsi melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)

201.014.500,00

**REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERINDAG PROV. KALBAR**

URUSAN	KODE				NOMENKELATUR URUSAN PROVINSI	JUMLAH USULAN PENDANAAN RENCANA KEGIATAN
	BIDANG URUSAN	POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
TOTAL DINAS PERINDAG						8.833.667.900
xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.790.161.400
xx	xx	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	726.496.500
xx	xx	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	27.644.600
xx	xx	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	36.243.900
xx	xx	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	53.995.800
xx	xx	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	529.101.200
xx	xx	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.511.000
xx	xx	01	1.02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.310.230.000
xx	xx	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	900.000.000
xx	xx	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.413.000
xx	xx	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	57.261.000
xx	xx	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	79.739.000
xx	xx	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.234.000
xx	xx	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.720.000
xx	xx	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	60.133.000
xx	xx	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12.538.000
xx	xx	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.192.000
xx	xx	01	1.03		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.398.534.900
xx	xx	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
xx	xx	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.000.000
xx	xx	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	75.169.000
xx	xx	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	24.000.000
xx	xx	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	180.860.000
xx	xx	01	1.03	07	Penyediaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	155.860.000
xx	xx	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	272.750.000
xx	xx	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.000.000
xx	xx	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	57.425.000
xx	xx	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000
xx	xx	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	199.100.000
xx	xx	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	73.788.000
xx	xx	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
xx	xx	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000
xx	xx	01	1.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	280.000.000
xx	xx	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	56.600.000
xx	xx	01	1.03	26	Pengadaan Meubelair	46.800.000
xx	xx	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	101.100.000
xx	xx	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.000.000
xx	xx	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	47.000.000
xx	xx	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	142.482.900
xx	xx	01	1.03	36	Pemeliharaan Mebeleur	7.500.000
xx	xx	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	191.100.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKELATUR URUSAN PROVINSI	JUMLAH USULAN PENDANAAN RENCANA KEGIATAN
		POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
xx	xx	01	1.04		Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	354.900.000
xx	xx	01	1.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	194.900.000
xx	xx	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	160.000.000
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.889.405.500
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	99.849.000
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	99.849.000
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	99.849.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	545.206.400
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	228.963.200
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	158.381.600
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	70.581.600
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	316.243.200
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	207.061.600
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	109.181.600
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.157.243.000
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.157.243.000
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	394.588.000
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	552.835.000
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	209.820.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	602.966.400
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	374.819.800
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	280.571.600
3	30	06	1.01	02	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	56.066.600
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	38.181.600
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	228.146.600
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	228.146.600
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	484.140.700
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	98.393.600
3	30	01	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	98.393.600

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKELATUR URUSAN PROVINSI	JUMLAH USULAN PENDANAAN RENCANA KEGIATAN
		POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	128.292.000
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	128.292.000
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	257.455.100
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	121.194.000
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	54.143.600
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	82.117.500
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.154.101.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NDUSTRI	710.355.000
3	31	02	1.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	710.355.000
3	31	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	137.229.000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	137.229.000
3	31	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	137.229.000
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	137.229.000
3	31	02	1.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	161.439.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	293.036.000
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	293.036.000
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	236.573.000
3	31	03	1.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi Dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	56.463.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.710.000
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	150.710.000
3	31	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	77.572.000
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	73.138.000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**R K A
BELANJA SKPD**

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2021

Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN)

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

K o d e					U r a i a n	Sumber Dana	Lokasi	J u m l a h						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T - 1	T				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			-	1.946.834.000	385.464.000	-	-	2.332.298.000	-
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			-	688.146.000	385.464.000	-	-	1.073.610.000	-
3	31	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				12.000.000				12.000.000	
3	31	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				14.000.000				14.000.000	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan			-	61.000.000	-	-	-	61.000.000	-
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				27.000.000				27.000.000	
3	31	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				26.000.000				26.000.000	
3	31	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.000.000				8.000.000	
3	31	01	1.03		Administrasi Umum			-	551.146.000	385.464.000	-	-	936.610.000	-
3	31	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik				65.000.000				65.000.000	
3	31	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				12.000.000				12.000.000	
3	31	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				1.650.000				1.650.000	
3	31	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				63.300.000				63.300.000	
3	31	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				85.600.000				85.600.000	
3	31	01	1.03	09	Penyediaan Alat Tulis Kantor				37.000.000				37.000.000	
3	31	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.000.000				22.000.000	
3	31	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000				5.000.000	
3	31	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				650.000	332.114.000			332.764.000	
3	31	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				650.000	53.350.000			54.000.000	
3	31	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000				5.000.000	
3	31	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				9.000.000				9.000.000	
3	31	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				70.000.000				70.000.000	
3	31	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				101.500.000				101.500.000	
3	31	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				14.996.000				14.996.000	
3	31	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				24.800.000				24.800.000	
3	31	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				33.000.000				33.000.000	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**R K A
BELANJA SKPD**

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2021

Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T - 1	T				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15
3.30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			-	2.507.500.000	957.500.000	-	-	3.465.000.000	-
3.30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			-	2.507.500.000	957.500.000	-	-	3.465.000.000	-
3.30	01	1	01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	42.339.000	-	-	-	42.339.000	-
3.30	01	1	01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				18.629.000				18.629.000	
3.30	01	1	01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				23.710.000				23.710.000	
3.30	01	1	02		Administrasi Keuangan			-	50.292.000	-	-	-	50.292.000	-
3.30	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.782.000				8.782.000	
3.30	01	1	02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				24.173.000				24.173.000	
3.30	01	1	02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17.337.000				17.337.000	
3.30	01	1	03		Administrasi Umum			-	1.597.814.000	957.500.000	-	-	2.555.314.000	-
3.30	01	1	03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000				10.000.000	
3.30	01	1	03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000				150.000.000	
3.30	01	1	03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				15.000.000				15.000.000	
3.30	01	1	03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				2.800.000				2.800.000	
3.30	01	1	03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				68.500.000				68.500.000	
3.30	01	1	03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				130.650.000				130.650.000	
3.30	01	1	03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				62.079.000				62.079.000	
3.30	01	1	03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47.500.000				47.500.000	
3.30	01	1	03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.650.000				45.650.000	
3.30	01	1	03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				950.000	63.000.000			63.950.000	
3.30	01	1	03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.570.000	37.500.000			82.070.000	
3.30	01	1	03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.500.000				1.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	------------------	----

3.30	01	1	03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				43.000.000				43.000.000	
3.30	01	1	03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				30.000.000				30.000.000	
3.30	01	1	03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				15.150.000	200.000.000			215.150.000	
3.30	01	1	03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				279.465.000	657.000.000			936.465.000	
3.30	01	1	03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				261.300.000				261.300.000	
3.30	01	1	03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				50.000.000				50.000.000	
3.30	01	1	03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				226.700.000				226.700.000	
3.30	01	1	03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				113.000.000				113.000.000	
3.30	01	1	04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	130.500.000	-	-	-	130.500.000	-
3.30	01	1	04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				25.500.000				25.500.000	
3.30	01	1	04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal				75.000.000				75.000.000	
3.30	01	1	04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000				10.000.000	
3.30	01	1	04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000				20.000.000	
3.30	06	1	02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			-	686.555.000	-	-	-	686.555.000	-
3.30	06	1	02	01	Verifikasi Mutu Produk				83.487.000				83.487.000	
3.30	06	1	02	02	Pengembangan Layanan Pengujian				108.786.000				108.786.000	
3.30	06	1	02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi				313.638.000				313.638.000	
3.30	06	1	02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi				180.644.000				180.644.000	
								-	2.507.500.000	957.500.000	-	-	3.465.000.000	-